

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
UDARA WINGS AIR DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN
BAGASI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HENY SA'DIYAH RELAWATI
C100150150

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
UDARA WINGS AIR DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN
BAGASI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

HENY SA'DIYAH RELAWATI

C100150150

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Dr. Shalman Al farizi, S.H., M.kn)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGANGKUTAN UDARA WINGS AIR DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BAGASI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA

Oleh:
HENY SA'DIYAH RELAWATI
C100150150

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 11 Februari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Shalman Al Farizi, S.H., M.Kn
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Februari 2019

Penulis



Heny Sa'diyah Relawati
C100150150

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENGANGKUTAN UDARA WINGS AIR DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BAGASI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA

Abstrak

Transportasi udara atau biasa disebut pengangkutan udara, dalam hal terjadinya suatu pengangkutan Wings Air bertanggungjawab atas keselamatan penumpang dan keamanan barang yang harus diangkutnya. Misalnya terjadinya kecelakaan, penundaan penerbangan, keterlambatan penerbangan, serta rusak dan hilangnya barang yang ditempatkan pada bagasi tercatat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara perusahaan dengan penumpang Wings Air, tingkat kesesuaian antara kinerja Wings Air dengan kepentingan penumpang apabila dilihat dari segi kualitas pelayanan, tanggungjawab hukum yang diberikan oleh Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian antara perusahaan penerbangan dengan penumpang Wings Air secara teoritis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah berlaku, tetapi dari segi pelaksanaan perjanjian, Wings Air belum mampu mengimplementasikan peraturan yang ada tersebut dalam kenyataannya. Dari segi kualitas pelayanan, penumpang merasa tidak puas karena pihak Wings Air belum mampu memenuhi kesesuaian tingkat kepentingan pelanggan secara maksimal. Dalam hal terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan barang bagasi tercatat Wings Air melakukan pencarian barang selama 14 hari. Setelah barang tersebut ditemukan, akan dikembalikan kepada pemilik tetapi apabila barang tersebut tidak ditemukan akan diberikan ganti kerugian. Sama halnya dalam kasus keterlambatan penerbangan juga akan diberikan ganti kerugian kepada penumpang. Tetapi dalam realitasnya penumpang yang pernah mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang bagasi tercatat serta keterlambatan penerbangan tidak pernah menerima ganti kerugian, penumpang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.

Kata Kunci: tanggung jawab hukum, Wings Air, kehilangan barang, keterlambatan penerbangan

Abstract

Air transportation or commonly called air transportation, in the event of the occurrence of a transportation Wings Air is responsible for passenger safety and the safety of the goods that must be transported. For example the occurrence of accidents, flight delays, flight delays, and damage and loss of goods placed on the checked baggage. The purpose of this study was to determine the implementation

of the transport agreement between the company and Wings Air passengers, the degree of compatibility between Wings Air's performance and the interests of passengers when viewed in terms of service quality, legal responsibility given by Wings Air to passenger and baggage transportation. This study uses a normative juridical approach, namely a method of approach in legal research conducted by examining library materials or secondary data as basic material to be examined by conducting a search of the rules and literature relating to the problem under study, while This type of research is descriptive research, namely research that aims to describe something in a particular area and at a certain time. The data used are primary data and secondary data. The results of the study show that the implementation of the agreement between the airlines and Wings Air passengers is theoretically in accordance with the provisions of the legislation applicable, but in terms of implementing the agreement, Wings Air has not been able to implement the existing regulations in reality. In terms of service quality, passengers feel dissatisfied because Wings Air has not been able to meet the maximum level of customer interest. In the event of loss and / or damage to luggage items, Wings Air conducts a search for 14 days. After the item is found, it will be returned to the owner but if the item is not found it will be compensated. Similarly, in the case of flight delays, compensation will also be given to passengers. But in reality passengers who have experienced damage and / or loss of checked baggage items and flight delays have never received compensation, passengers feel disadvantaged because they are not in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 77 of 2011.

Keywords: legal responsibility, Wings Air, loss of goods, flight delays

1. PENDAHULUAN

Dilihat dari segi historisnya, Indonesia pertama kali membeli sebuah pesawat Dakota RI-001 yang diberi nama 'Seuwlawah'. Pesawat tersebut di beli dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Aceh dari revolusi fisik, yang menghubungkan antara Sumatra dan Pulau Jawa. Dan untuk pertama kalinya juga Indonesia mendirikan suatu perusahaan penerbangan pada tahun 1950 yang di beri nama Garuda Indonesia. Keberadaan pesawat Garuda Indonesia sendiri berkembang sangat pesat. Hampir 80 %, Pesawat Garuda Indonesia mampu mengangkut hampir seluruh rute penerbangan daerah-daerah domestik Indonesia. Selain Garuda Indonesia, ada berbagai perusahaan pengangkutan yang berada di Indonesia seperti Air Asia, Lion Air, Sriwijaya Air dan masih banyak lagi.

Akan tetapi dalam realitanya, marak sekali kasus-kasus yang terjadi pada perusahaan-perusahaan penerbangan. Perusahaan penerbangan sering mengabaikan resiko yang akan terjadi baik itu resiko pada kualitas pemeliharaan

pesawatnya, kualitas pelayanannya dan bahkan pada kualitas kenyamanan, keamanan serta perlindungan konsumen. Dalam hal ini tentu saja membuat masyarakat khawatir akan kenyamanan serta keselamatan mereka karena perusahaan penerbangan dianggap tidak lagi mampu menjamin tingkat keselamatan pada penumpang.

Berdasarkan hasil penelitian, angka kecelakaan semakin menjulang naik dari era 2000-an. Dan Sampai sekarang ini. Hampir ada 30 pesawat udara mengalami kecelakaan. Ini jelas terbukti bahwa perusahaan penerbangan mengabaikan resiko-resiko yang ada. Dan Hal yang paling umum terjadi adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban oleh perusahaan pengangkutan udara. Salah satu Contohnya adalah kasus menelantarkan penumpang yang terjadi di Bandara Internasional Minangkabau Padang, Salah satu maskapai penerbangan menelantarkan penumpang dengan alasan yang sangat klise yaitu terjadinya gangguan pada mesin. Bahkan menurut keterangan yang ada, Perusahaan penerbangan tersebut tidak hanya mengalami keterlambatan penerbangan dalam waktu 1- 2 Jam saja tetapi hingga 9 jam. Pihak maskapai menjanjikan kepada penumpang dengan rute medan-padang tentang adanya pesawat pengganti dari batam . Akan tetapi, janji tersebut hanyalah sebuah janji karena pesawat yang dijanjikan dari Batam tersebut gagal mendarat akibat cuaca yang buruk. Karena terlalu lama menunggu adanya suatu kebijaksanaan dari perusahaan penerbangan tersebut, para penumpang pun mencari pesawat pengganti sendiri dari arah jakarta.

Melihat peristiwa tersebut, tidak membuat perusahaan penerbangan berusaha melakukan evaluasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Bahkan pihak maskapai penerbangan melakukan pengabaian terhadap peristiwa tersebut. Seharusnya Perusahaan Penerbangan memberikan pertanggungjawaban. Tentu saja pertanggungjawaban tersebut harus mengacu pada Kekuatan Hukum perdata Nasional yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Ordonansi Pengangkutan Udara (STb 1939-100), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011. Sehingga tidak menimbulkan suatu kerugian dari salah satu pihak. Pemberian tanggungjawab

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tentu saja dapat mempermudah menentukan siapa saja yang dapat bertanggung jawab, hal-hal apa saja yang mampu di pertanggungjawabkan, bentuk-bentuk tanggung jawabnya, ganti kerugian dan lain-lain. Akan tetapi, banyak sekali perusahaan pengangkutan udara yang mengabaikan peraturan-peraturan yang ada. Mereka mempertahankan peraturan hukum yang mereka buat sendiri demi memberikan keuntungan bagi mereka sendiri. Selama ini Penumpang cenderung menjadi pihak yang paling lemah bila dibandingkan perusahaan pengangkutan udara yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat. Padahal seharusnya antara pihak maskapai penerbangan dengan penumpang haruslah seimbang, sejajar dan mempunyai porsi yang sama kuatnya, karena pada prinsipnya mereka mempunyai sifat saling ketergantungan, saling membutuhkan satu sama lain.

Berdasarkan uraian di atas, membuat Penulis berfikir apakah kinerja Perusahaan penerbangan satu dengan yang lain sama? Apakah Tanggung jawab hukum yang diberikan oleh perusahaan penerbangan dalam kantor perwakilan pada daerah satu dengan yang lainnya sama? Dalam hal ini, membuat penulis ingin melakukan pengkajian lebih dalam lagi terhadap salah satu perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia yaitu Wings Air dengan judul penelitian “TINJAUAN HUKUM PERUSAHAAN PENGANGKUTAN UDARA WINGS AIR DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BAGASI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA”.

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Penerbangan menyebutkan bahwa “*Pengangkutan Udara adalah Setiap Kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara*”.

Sementara itu, menurut Wakil Menteri Perhubungan mengatakan bahwa “*Secara global pertumbuhan perjalanan yang dilakukan melalui udara semakin meningkat 5 % tiap tahunnya ,atau secara umum mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat setiap 10 Tahun*”.

Dalam pengangkutan udara sendiri ada dua pihak yang saling terikat satu sama lain yaitu pihak pengangkut dengan pihak penumpang. Kedua belah pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dan kedua belah pihak tersebut terikat pada suatu perjanjian yaitu perjanjian pengangkutan.. Hal ini di jelaskan pada Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Penerbangan, yang menyatakan bahwa *“Perjanjian Pengangkutan Udara adalah perjanjian antara pihak pengangkut dengan pihak penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain”*.

Ini artinya kedua belah pihak telah terikat sejak perjanjian tersebut disepakati dan harus menjalankan hak dan kewajiban itu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi maka harus diberikan suatu tanggung jawab yaitu memberikan ganti kerugian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menjelaskan bahwa *“Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan Angkutan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga”*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul tujuan dari penelitian yang dapat dirinci sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban serta peraturan dalam perjanjian pengangkutan antara perusahaan pengangkutan dengan penumpang pada Maskapai Penerbangan Wings Air; (2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pengangkutan; dan (3) Untuk mengetahui tanggungjawab hukum yang diberikan oleh Maskapai Penerbangan Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi.

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik itu secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sebagai berikut: (1) Manfaat secara teoritis. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum pada regulasi hukum positif Indonesia dalam bidang Hukum Perdata terutama terkait tanggung jawab maskapai penerbangan dalam pengangkutan pada penumpang dan barang baik secara teoritis maupun dalam pelaksanaannya

khususnya pada perusahaan penerbangan Wings Air Indonesia, (2) Manfaat Secara Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk para pihak yang bersangkutan tetapi juga mampu memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya yang memerlukan suatu informasi hukum dalam hal pengangkutan udara.

2. METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam Penelitian ini ada adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dilakukan di (1) Terminal Bandar Udara Internasional Juanda yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Betrou, Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. (2) Kantor Wings Air Surabaya yang beralamat di Jalan Sulawesi No. 75 Surabaya. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, menyusun daftar pertanyaan dan wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Peraturan dalam Perjanjian Pengangkutan antara Perusahaan Penerbangan dengan Pihak Penumpang Wings Air

Pelaksanaan pengangkutan penumpang maupun barang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh Wings Air dengan penumpang sebagaimana telah dimuat dalam tiket. Pelaksanaan pengangkutan diawali dengan tahap pengambilan muatan, pelaksanaan pengangkutan penumpang sampai dengan tempat tujuan. Semua peraturan-peraturan yang termuat dalam perjanjian pengangkutan antara pihak penumpang dengan pihak perusahaan penerbangan telah secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dalam hal ini ada sebagian peraturan yang tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Semua peraturan-peraturan yang termuat dalam perjanjian pengangkutan antara pihak penumpang dengan pihak perusahaan penerbangan telah secara sah

berlaku sebagai undang-undang. Para pihak harus menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan apabila yang melanggarnya maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam perjanjian pengangkutan dan perjanjian tersebut akan terus berlaku selama penumpang dan/ atau barang tersebut belum sampai pada bandara tempat tujuan.

Setelah terjadinya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak perusahaan penerbangan dengan pihak penumpang maka timbulah suatu hubungan hukum. Dalam suatu hubungan hukum tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban. Timbulnya suatu Hak dan Kewajiban, dikarenakan adanya kata kesepakatan. Kesepakatan lahir karena adanya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya perjanjian: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian (3) Mengenai suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal.

3.2 Faktor-faktor yang Dapat Menghambat Terjadinya Pengangkutan

Faktor ataupun kendala yang dihadapi oleh Wings Air dalam pelaksanaan pengangkutan melalui jalur udara adalah faktor alam, faktor kondisi pesawat, sumber daya manusia

3.3 Tanggungjawab Hukum yang Diberikan oleh Wings Air terhadap Pengangkutan Penumpang dan Bagasi

Dalam ajaran Islam dianjurkan kepada umatnya untuk saling menghormati dan saling menghargai serta menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia. Hanya saja yang menjadi problematika dalam ajaran Islam adalah kurangnya rasa tanggungjawab. Sedangkan Islam sendiri telah mengajarkan mengenai bentuk tanggung jawab, berikut adalah berbagai macam bentuk tanggung jawab, antara lain:

Pertama, Tanggung jawab antara manusia dengan sang khaliq yaitu Allah SWT. Tanggung jawab antara manusia dengan sang khaliq adalah Tanggung jawab dalam segala sesuatu yang pernah dilakukannya selama di dunia. Pertanggungjawaban dalam hal beribadah dengan-Nya, Mentaati Peraturan-Nya, Menjauhi apa yang selalu menjadi Larangan-Nya.

Kedua, Tanggung jawab antara manusia dengan manusia Tanggung jawab antar sesama manusia adalah berupa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari atau yang biasa disebut dengan muamalah. Dalam bermuamalah hendaknya sesama manusia saling memiliki iktikad yang baik satu sama lain, tidak saling merugikan satu sama lain, saling bermanfaat dan mempunyai jiwa yang amanah. Seseorang yang mempunyai sikap bermanfaat dan amanah akan menjalani hidup dengan tenang dan aman serta tidak mungkin berbuat curang pada pihak yang lain.

Ketiga, Tanggung jawab manusia terhadap keluarganya H.R Bukhari mengatakan *Setiap engkau adalah pemelihara, dan setiap engkau akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharanya: Seorang pemimpin adalah pemelihara, ia akan di mintai pertanggung jawaban atas yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang laki-laki pemelihara dalam keluarganya, ia akan di mintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawabnya. dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya, ia akan di mintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggungjawab pemeliharanya.*

Dalam Hukum Positif di Indonesia juga mengatur mengenai Tanggung Jawab: Tanggungjawab hukum yang diberikan oleh Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi (1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas Praduga (2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas mutlak (3) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan.

Pertama, Tanggungjawab hukum atas dasar adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Wings Air. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana tidak dipenuhi nya suatu kewajiban atau suatu prestasi berdasarkan kesepakatan. Prestasi sendiri mengandung pengertian bahwa sesuatu yang harus dipenuhi. dalam hal memberikan ganti kerugian tidak serta merta menjadi tanggung jawab dari pihak maskapai penerbangan. Ini dikarenakan dalam bagasi itu sendiri di bagi menjadi dua macam. Yang pertama, bagasi kabin kemudian yang kedua adalah bagasi tercatat. Untuk bagasi kabin sendiri bukan menjadi tanggung jawab perusahaan penerbangan karena barang kabin merupakan barang yang di bawa

penumpang sendiri. Sehingga, apabila ditemukan adanya kerusakan dan/ atau kehilangan akan menjadi tanggung jawab penumpang itu karena barang kabin menjadi pengawasan penumpang. Pengecualian, apabila penumpang mampu membuktikan bahwa hilangnya dan/atau rusaknya barang bagasi itu karena kesalahan pengangkut atau pihak maskapai penerbangan. Sedangkan Bagasi tercatat, dalam Hal Hilang, cacat, musnah dan/atau rusaknya barang bagasi tercatat menjadi kewajiban Pihak Wings Air untuk memberikan ganti dalam realitanya pada responden yang pernah mengalami kehilangan barang bagasi tercatat. Pihaknya telah melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak maskapai penerbangan di Kantor Pengurusan kehilangan bagasi Wings Air, akan tetapi sampai dengan sekarang pihak Wings Air tidak pernah memberikan kejelasan mengenai masalah kehilangan barang bagasi tersebut. Bahkan sudah beberapa kali pihaknya menghubungi pada bagian Kantor Kehilangan bagasi Wings Air namun tak kunjung mendapat jawaban juga. Menurutnya, Pihak Wings Air telah lalai untuk memenuhi perjanjiannya karena tidak berusaha memenuhi hak dari penumpang.

Kedua, Atas adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Wings Air. Dalam Pasal 1365 KUHPdata menjelaskan perbuatan melawan hukum sebagai berikut: Perbuatan Melawan Hukum merupakan tiap-tiap tindakan dan/ atau perbuatan yang menimbulkan suatu kerugian bagi diri sendiri, serta orang lain dan karena salahnya tersebut mengakibatkan orang lain menerbitkan kerugian tersebut dan mengganti kerugian. Adanya suatu keterlambatan penerbangan bagi penumpang tentu menimbulkan suatu kerugian terhadap pihak penumpang. Artinya penumpang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap perusahaan penerbangan Wings Air. ini disebabkan karena yang pertama pihak Wings Air menjual tiket yang bukan rute penerbangannya, kemudian yang kedua pihak Wings Air tidak melakukan pemberitahuan kepada penumpang bahwa rute tersebut akan diangkut menggunakan maskapai penerbangan lain. Ketiga, pihak Wings Air membatalkan penerbangan secara sepihak, sehingga membuat penumpang harus memesan tiket baru dan harus terlambat bertemu dengan salah satu kliennya. Atas perbuatan tersebut

penumpang sama sekali tidak mendapatkan klarifikasi apapun dari pihak Wings Air, Penumpang tidak mendapatkan haknya untuk menerima suatu ganti kerugian. Padahal, Tanggungjawab pengangkut sendiri telah diatur dalam Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992, Menyatakan bahwa tanggungjawab pengangkut adalah tanggung jawab terhadap keterlambatan. Dalam hal ini Perusahaan penerbangan harus bertanggung jawab secara penuh terhadap penumpang. Sebagaimana juga yang telah diatur dalam Pasal 28 Ordonansi Pegangkutan udara 1939, yang menyatakan bahwa apabila tidak ada perjanjian lain, pengangkut bertanggungjawab terhadap suatu kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan penumpang. Ketentuan tersebut kemudian disalah tafsirkan oleh pihak maskapai penerbangan bahwa pihak maskapai penerbangan bisa membuat suatu perjanjian lain seperti contohnya membuat persyaratan perjanjian pengangkut yang membebaskan pengangkut untuk memberikan ganti kerugian dalam suatu hal tertentu. Sudah pasti penafsiran yang dilakukan oleh pihak pengangkut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk melanggar ketentuan dalam konvensi warsawa 1929. Karena Perusahaan Penerbangan telah membuat suatu perjanjian sendiri dengan menghilangkan tanggungjawab dalam memberikan ganti kerugian terutama mengenai keterlambatan penerbangan yang seharusnya diberikan kepada penumpang Sehingga terlihat sekali bahwa perusahaan penerbangan Wings Air menyalahgunakan salah penafsiran tersebut demi keuntungan pihak maskapai sendiri. Sudah bukan rahasia umum lagi dikalangan masyarakat apabila penumpang mengalami keterlambatan penerbangan dan atas keterlambatan tersebut penumpang tidak mampu berbuat lebih jauh lagi, bahkan melakukan tindakan protes pun dirasa percuma. Para penumpang hanya bisa berbuat pasrah menerima segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak maskapai penerbangan. Menganggap keterlambatan penerbangan hal yang lumrah karena pihak maskapai penerbangan selalu beralasan bahwa penundaan jadwal penerbangan tersebut merupakan suatu kesalahan teknis yang ada pada pesawat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta peraturan dalam perjanjian pengangkutan antara Perusahaan Penerbangan dengan Pihak Penumpang Wings Air. Pelaksanaan pengangkutan penumpang maupun barang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh Wings Air dengan penumpang sebagaimana telah dimuat dalam tiket. Pelaksanaan pengangkutan diawali dengan tahap pengambilan muatan, pelaksanaan pengangkutan penumpang sampai dengan tempat tujuan. Semua peraturan-peraturan yang termuat dalam perjanjian pengangkutan antara pihak penumpang dengan pihak perusahaan penerbangan telah secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dalam hal ini ada sebagian peraturan yang tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, Faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, terjadinya penundaan penerbangan, keterlambatan penerbangan oleh Wings Air. Faktor ataupun kendala yang dihadapi oleh Wings Air dalam pelaksanaan pengangkutan melalui jalur udara adalah faktor alam, faktor kondisi pesawat, sumber daya manusia penumpang.

Ketiga, Tanggungjawab hukum yang diberikan oleh Wings Air terhadap pengangkutan penumpang dan bagasi (1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas Praduga (2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas mutlak (3) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan. *Pertama*, atas dasar wanprestasi. Dalam memberikan ganti kerugian terhadap hilangnya, cacatnya, musnahnya dan/atau rusaknya barang di maskapai. penumpang sama sekali tidak mendapatkan hak-haknya dari Pihak Wings Air sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Pengangkut Udara. Pihak Wings Air melakukan wanprestasi karena tidak memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai upaya apa yang pihaknya berikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi terhadap para penumpangnya. Wings Air terkesan tidak peduli terhadap kerugian yang dialami para penumpangnya.

Kedua, Atas Perbuatan Melawan Hukum, penumpang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap perusahaan penerbangan Wings Air, dalam hal ini

disebabkan karena pihak Wings Air menjual tiket yang bukan rute penerbangannya, kemudian yang kedua pihak Wings Air tidak melakukan pemberitahuan kepada penumpang bahwa rute tersebut akan diangkut menggunakan maskapai penerbangan lain. pihak Wings Air membatalkan penerbangan secara sepihak, sehingga membuat penumpang mengalami kerugian.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis membuat beberapa saran agar nantinya dapat dijadikan sebagai bahan masukan serta perbaikan bagi para pihak serta masyarakat terkait dengan pengangkutan dan barang melalui perusahaan pengangkutan udara yaitu:

Pertama, Kepada pihak Wings Air. Dalam pelaksanaan pengangkutan, langkah lebih lanjut yang perlu dilakukan dalam mewujudkan keselamatan baik itu pada penumpang maupun barang antara lain: (1) Keselamatan (*safety*). Mengupayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat dengan cara kerja secara konsisten menuju penghapusan/pencegahan kecelakaan, kerusakan dan kematian dalam penyelenggaraan transportasi; (2) Mobilitas (*mobility*). Menjamin terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu, efisien, terjangkau dengan memberikan pilihan yang fleksibel; dan (3) Pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing melalui transportasi yang efisien dan fleksibel.

Pihak Wings Air seharusnya lebih memberikan rasa tanggung jawab dan memberikan transparansi prosedur tentang upaya yang dapat ditempuh jika mengalami keterlambatan penerbangan dan kerusakan dan/ atau kehilangan barang bagasi agar nantinya penumpang tidak merasa di rugikan. Apabila terjadi resiko atas pengangkutan penumpang dan barang hendaknya Wings Air membantu pihak penumpang agar tidak merugikan salah satu pihak dan pengganti rugi berjalan dengan cepat dan lancar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Untuk mempertinggi dedikasi dan kepercayaan masyarakat kepada Wings Air sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan pengangkutan penumpang dan barang, sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan yang

lebih baik lagi kepada penumpang, meningkatkan efisiensi, dan efektifitas baik sarana maupun prasarana yang ada.

Kedua, Kepada penumpang, agar lebih memperhatikan prosedur yang telah diberikan oleh Wings Air dan lebih berhati-hati terhadap barang bawaannya dan agar pihak penumpang dapat melakukan upaya hukum apabila hak-haknya tidak terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, Kepada pemerintah, diperlukan adanya peran pemerintah dalam menentukan kebijakan adanya pemberian tanggung jawab. Dalam hal ini agar tidak ada para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya keberlakuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, pemerintah juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya untuk para calon penumpang agar mengerti bagaimana seluk beluk dari pengangkutan udara, bagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan dan bagaimana hak dan kewajiban yang seharusnya didapatkan. Itu semua perlu di beritahukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia, dalam Prespektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press.

Sution, Adji Usma. *et.al.* 1991. *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Zainuddin, Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Martono dan Agus Pramono. 2013, *Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Lestari, Ningrum. 2006. *Usaha Perjalanan Wisata dalam Prespektif Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. 2014. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa.

Soerjono, Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Saefullah, Wiradipradja E. 1989. *Tanggungjawab pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Yogyakarta: Liberty.

Aturan Perundang-undangan

Konvensi Warsawa 1929 tentang convention for the unification of Certain Rules Relating to International by Air

Ordonasi Pengangkutan Udara (Stb. 1939 No. 100) tentang Pengangkutan Udara yang mengatr pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara